

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Wastam Wahyu Hidayat (2018) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014.	Variabel bebas: <ol style="list-style-type: none">1. Profitabilitas2. <i>Leverage</i>3. Pertumbuhan Penjualan Variabel terikat: <ol style="list-style-type: none">1. Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014). Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan	Variabel bebas: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Leverage</i>2. Kepemilikan Institusional3. Ukuran Perusahaan Variabel terikat: <ol style="list-style-type: none">1. Penghindaran	Analisis regresi linier berganda	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi kepemilikan institusional serta ukuran

	Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.	Pajak		persahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Hermawan Noor Andriyanto (2015). Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Efficiencie</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012.	Variabel bebas: 1. <i>Return On Asset</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Corporate Governance</i> 4. <i>Sales Growth</i> Variabel terikat: 1. <i>Tax Efficiencie</i>	Analisis regresi linier berganda	<i>ROA, leverage</i> dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan jumlah dewan komisaris, komisarin independen dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	Jeong Ho Kim (2017). <i>The Study On The Effect And Determinants Of Small And Medium Sized Entities Conducting Tax Avoidance.</i>	Variabel bebas: 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>ROA</i> 3. <i>Leverage</i> 4. Arus kas operasi 5. <i>Capital intensity</i> 6. <i>R&D intensity</i> 7. Tingkat pertumbuhan perusahaan Variabel terikat: 1. Penghindaran	Analisis regresi dan korelasi	Ukuran perusahaan, <i>ROA, leverage, arus kas operasi, capital intensity, R&D intensity</i> dan tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Di Lanjutkan...

		Pajak		
5	<p>Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).</p> <p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Variabel bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan 2. Umur Perusahaan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> 5. Pertumbuhan Penjualan <p>Variabel terikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Avoidance</i> 	Model regresi berganda	<p>Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas serta pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
6	<p>Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018).</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Variabel bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Kepemilikan Institusional <p>Variabel terikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Avoidance</i> 	Analisis regresi linier berganda	<p>Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
7	<p>Aisha Zuesty (2016).</p> <p>Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Tindakan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan</p>	<p>Variabel Bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional 2. Risiko Perusahaan 3. <i>Leverage</i> <p>Variabel terikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Avoidance</i> 	Model regresi berganda	<p>Kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Di Lanjutkan...

	Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2014.			
8	Eliyani Susanti (2018). Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2017.	Variabel bebas: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Sales Growth</i> 4. Ukuran Perusahaan Variabel terikat: 1. Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas serta <i>Sales Growth</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan <i>Leverage</i> serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
9	Nur Adhima (2018). Pengaruh Solvabilitas, <i>Sales Growth</i> , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017.	Variabel bebas: 1. Solvabilitas 2. <i>Sales Growth</i> 3. Kepemilikan Institusional Variabel terikat: 1. Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Solvabilitas dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya dari (Nur Adhima, 2018) tentang pengaruh solvabilitas, *sales growth* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian (Nur Adhima, 2018) adalah terdapat pada variabel independen yaitu solvabilitas, *sales growth*, dan kepemilikan institusional. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada variabel terikatnya yaitu penghindaran pajak. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penelitian dan tahun penelitian dimana penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Prinsipal memperkerjakan agen untuk melaksanakan tugas demi kepentingannya termasuk pendelegasian otorisasi pemungutan hasil dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri dari saham, pemegang saham berperan sebagai prinsipal, sedangkan CEO (*Chief Executive Officer*) bertindak sebagai agen. Agen dipekerjakan untuk berperan sesuai dengan kepentingan principal (Antony & Govindarajan, 2011).

Dalam teori keagenan, agen dianggap sebagai individu yang rasional, yang mempunyai kepentingan pribadi dan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajer berperan sebagai agen bertanggung jawab untuk

memaksimalkan keuntungan para pemilik (*prinsipal*), tetapi disisi lain manajer juga memiliki kepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak atas kepentingan pribadi *prinsipal* (Adi dan Nur, 2013) dalam (Zuesty, 2016).

Manajemen sebagai pemimpin perusahaan lebih memahami informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kualifikasi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan manajer potensial terjadi apabila prinsipal tidak mempunyai saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu mengharapkan manajemen bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran sendiri. Terjadilah *conflict of interest*. Untuk memastikan bahwa manajer bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik saham, pemilik saham wajib mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* (Atmaja, 2008) dalam (Zuesty, 2016).

Adanya konflik kepentingan dalam kepemilikan dapat menimbulkan biaya agensi (*agency cost*), yakni biaya yang dikeluarkan agar pihak yang diberikan wewenang dapat bertindak sesuai kemauan pemilik (Atmaja, 2008) dalam (Zuesty, 2016). Contoh biaya agensi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk melangsungkan pemeriksaan (*monitoring cost*), biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mencegah agar tindakan manajer tetap sesuai dengan kepentingannya.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk menanggung agar manajer tidak mengambil keuntungan dan fasilitas yang diberikan (*bonding cost*).
- c. Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengembalikan citra perusahaan dan kesan yang buruk karena tidak tercapainya dua tujuan tersebut

2.2.2 Teori *Trade-off*

Menurut (Bringham & Houston, 2006) “Teori *trade-off* menjelaskan bahwa perusahaan akan berhutang sampai dengan pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*). Biaya kesulitan keuangan ialah biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) dan biaya keagenan (*agency costs*) yang berkembang dari hasil turunnya kredibilitas suatu perusahaan”.

Teori *trade-off* dalam memilih bentuk modal yang optimal melakukan beberapa faktor antara lain biaya keagenan, pajak serta biaya kesulitan keuangan, namun tetap mempertahankan anggapan kemampuan pasar pada *symmetric information* sebagai perbandingan dan keuntungan penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal dapat tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimum terhadap biaya *financial distress*.

Trade-off theory memiliki asosiasi bahwa manajer akan berpikir antara penghematan pajak dan biaya *financial distress* dalam menentukan struktur

modal. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berupaya meminimalkan pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga dengan bertambahnya hutang tersebut akan menurunkan pajak (Bringham & Houston, 2006).

2.2.3 Teori Pemegang Saham

Menurut (Sutedi, 2011) Teori pemegang saham menjelaskan bahwa tanggung jawab yang paling utama dari direksi adalah bekerja untuk kepentingan menambahkan nilai dari pemegang saham. Apabila perusahaan memperhatikan kepentingan karyawan, peggan, pemasok, dan lingkungannya, maka nilai yang dicapai oleh pemegang saham semakin berkurang, sehingga berlangsungnya pengelolaan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham untuk memastikan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilai pemegang saham.

Teori yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan memiliki tujuan untuk mendukung manajemen perusahaan dalam meningkatkan pembuatan nilai menjadi dampak dari aktivitas yang dilakukan dan memperkecil kerugian yang bisa jadi muncul bagi para pemegang saham. Dalam penciptaan nilai perusahaan, manajemen perusahaan wajib dapat mengelola semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik aset fisik (*physical capital*), karyawan (*human capital*), maupun *structural capital*. Apabila semua sumber daya yang dimiliki perusahaan bisa dimanfaatkan dan dengan baik maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan para pemegang saham (Sutedi, 2011).

2.2.4 Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Menurut Smeets dalam (Waluyo, 2010) pajak merupakan hasil kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang berhasil dipaksakannya, tanpa adanya hasil yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, yang artinya untuk membayar pengeluaran pemerintah. Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung guna untuk memenuhi pengeluaran negara.

Ada dua fungsi dalam pajak yaitu fungsi *Budgetair* dimana pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi *Regulered* dimana pajak sebagai alat ukur untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial (Waluyo, 2010).

2.2.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak berkaitan dengan penggolongan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghapus beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Mortenson) dalam (Zain, 2008).

Menurut Balter dalam (Zain, 2008) penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan oleh perusahaan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Suandy, 2001) Penghindaran Pajak adalah rekayasa perpajakan yang masih berada dalam bingkai ketetapan perpajakan.

Menurut Denny dalam (Zuesty, 2016) penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Dari pengertian penghindaran pajak tersebut, menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran

pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara legal.

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Setidaknya terdapat dua belas cara yang digunakan dalam mengukur penghindaran pajak yang umumnya digunakan (Hanlon & Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam tabel.

Tabel 2.2
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
5	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error tern from the following regression: ETR differential X Pre-tax book income= $\alpha + b \times$ Control + e</i>
7	<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S.CTE} + \text{FgnCTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$
8	<i>Temporary BTD</i>	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S.STR}$
9	<i>Abnormal total</i>	$\text{Residual from BTD} / \text{Tait} = \beta \text{Tait} + \beta \text{mi} + \text{eit}$

	BTD	
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firm accused of engaging in a tax shelter</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

Penghindaran pajak pada penelitian ini diproksikan menggunakan *cash effective tax rate*. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *cash effective tax rate* menurut Dyreng, S., dkk. (2010):

$$\text{Cash effective tax rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Dalam penelitian ini penghindaran pajak menggunakan CETR sebagai indikator karena CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Semakin kecil nilai *cash effective tax rate* artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya semakin besar nilai *cash effective tax rate* artinya semakin kecil penghindaran pajaknya (Dyreng, S., dkk. 2010).

2.2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

2.2.6.1 Solvabilitas

Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi (Sunyoto, 2014).

Menurut (Kasmir, 2014) solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Tujuan dari rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti bunga dan angsuran pinjaman, serta menilai berapa persentase dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.

Menurut Sartono dalam (Ngadiman & Puspitasari, 2014) solvabilitas adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan.

Solvabilitas yakni suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018).

Rumus yang digunakan untuk mengukur solvabilitas, menurut (Kasmir, 2014) yaitu:

$$Debt\ to\ asset\ ratio = \frac{Total\ hutang}{Total\ aset}$$

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Debt to asset ratio* sebagai indikator solvabilitas karena *debt to asset ratio* dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan cenderung lebih kecil (Dewinta & Setiawan, 2016).

2.2.6.2 Sales Growth

Menurut Carleton dan Silberman (1997) dalam (Andriyanto, 2015) pertumbuhan penjualan mencerminkan prospek perusahaan dengan horizon lebih pendek dari pada pertumbuhan total aktiva. Variabel pertumbuhan penjualan didasarkan pada argumen bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat produktivitas terpasang yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan penjualan juga mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang.

Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) *sales growth* menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan akan meningkat,

hal ini diikuti dengan kenaikan beban pajak perusahaan. Kemungkinan perusahaan dapat lebih meningkatkan kapasitas operasinya dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan yang juga meningkat, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan akan mendapatkan profit yang besar, oleh karena itu perusahaan akan mengarah pada tindakan penghindaran pajak karena keuntungan yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang besar pula sedangkan perusahaan berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Sales Growth (pertumbuhan penjualan) merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka profitabilitas akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun (Susanti, 2018).

Rumus yang digunakan untuk menilai *sales growth* menurut (Fahmi, 2014) adalah:

$$\text{Sales growth} = \frac{\text{Penjualan tahun ini} - \text{Penjualan tahun lalu}}{\text{Penjualan tahun lalu}}$$

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *sales growth* sebagai indikator karena *sales growth* dapat menjadi ukuran dari keberhasilan investasi yang terjadi pada periode lalu, sehingga dapat dijadikan prediksi pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

2.2.6.3 Kepemilikan Institusional

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi. Institusi dapat berupa perusahaan investasi, bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan, dan institusi lainnya.

Peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kemampuan manajemen akan didorong oleh adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Besaran investasi yang dimiliki oleh investor institusional akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Semakin besar pihak institusional mendominasi saham daripada pemegang saham lain, maka pengawasan dapat dilakukan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar pula, sehingga membuat pihak manajemen perusahaan menjauhi sikap yang mungkin merugikan para pemegang saham (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Menurut (Zuesty, 2016) jika pemilik institusional memiliki fungsi yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusional menganggap dapat mengendalikan manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri dan fokus pada kinerja ekonomi berdasarkan hak suara yang dimiliki.

Keberadaan investor institusional juga menunjukkan adanya desakan dari para investor institusional terhadap pihak manajemen untuk menjalankan praktik penghindaran pajak dalam rangka memperoleh keuntungan semaksimal mungkin untuk investor institusional (Dewi & Jati, 2014).

Menurut (Arianandini & Ramantha, 2018) bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Perhitungan kepemilikan institusional menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014) yaitu:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Total saham institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kepemilikan institusional sebagai indikator karena dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor

institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan (Zuesty, 2016).

2.3 Keterkaitan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dimungkinkan memakai utang dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal itu membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan (Zuesty, 2016).

Semakin besar jumlah utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan.

Penelitian Jeong Ho (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) pertumbuhan penjualan pada perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi pertumbuhan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan mendapatkan profit yang meningkat pula.

Apabila *sales growth* meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Hasil penelitian Dewinta & Setiawan (2016), Susanti (2018), dan Hidayat (2018) menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Zuesty, 2016) menyatakan bahwa keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional.

Pada dasarnya investor institusional ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya yang menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Zuesty, 2016).

Dalam penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Zuesty (2016) menjelaskan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

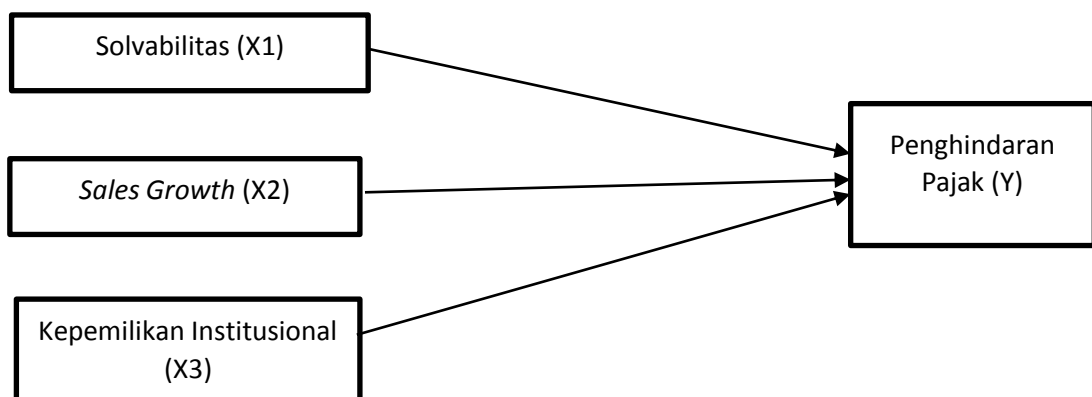
2.4 Kerangka Konseptual

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan respon positif, perusahaan selalu ingin membayar pajak serendah mungkin. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara ialah dengan memaksimalkan penggunaan hutang (solvabilitas), dan menambah biaya-biaya yang dihasilkan dari adanya pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Kepemilikan institusional juga akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan memperkecil pembayaran pajak kepada pemerintah melalui celah peraturan yang ada.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh solvabilitas, *sales growth*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kerangka pemikiran tersebut dapat disajikan pada gambar berikut.

Variabel Independen

VariabelDependen



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂ : *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Kepemilikan institusioanl berpengaruh terhadap penghindaran pajak.